

PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MEMASUKI AFTA

Agus Tri Basuki

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This article will analyze Indonesia's economic performance towards ASEAN free trade area (AFTA). From the economic performance, Indonesia is facing high threats, especially on the competitiveness of products and KKN (corruption, collusion and nepotism) problem that causes high cost economy. So, government and businessmen must anticipate it in order to strengthened Indonesia's economy.

Key words: AFTA, economic performance, competitiveness

PENDAHULUAN

Tekanan adalah kunci keberhasilan—dalam batas tertentu— dalam mengembangkan dunia industri dan perdagangan internasional. Tekanan itu, misalnya, dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yaitu peraturan tata tertib dalam perdagangan internasional yang pertama kali ditandatangani oleh negara-negara industri terkemuka pada tahun 1947. Selama bertahun-tahun, keanggotaan GATT telah meluas meliputi lebih dari hampir

100 negara. Perjanjian tarif dan perdagangan ini meliputi tiga prinsip utama dalam kegiatan mengatur percaturan perdagangan antara negara-negara anggotanya, yaitu: (1) perdagangan yang bebas, (2) non diskriminasi, dan (3) tidak ada pengendalian ekspor secara tidak *fair*.

Dari awalnya, perjanjian-perjanjian GATT terpaksa harus mengakui adanya hambatan-hambatan perdagangan yang tidak dapat begitu saja dihapuskan. Proteksi dan

subsidi hasil-hasil pertanian telah dibebaskan untuk tidak dimasukkan dalam perjanjian, walaupun usaha-usaha serius untuk memperbaiki perdagangan hasil-hasil pertanian telah memperoleh momentum pada akhir tahun 1980-an. Negara-negara yang sedang berkembang juga diizinkan untuk tetap melakukan proteksionisme, walaupun beberapa di antaranya telah secara sepihak membebaskan sendiri perdagangan mereka pada tahun 1980-an.

Liberalisme perdagangan dapat dibagi dalam dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan internasional (di bawah naungan GATT/WTO), yang memiliki tujuan untuk membentuk perdagangan bebas dengan cara mengurangi hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. *Kedua*, Pendekatan regional, yang bertujuan untuk membentuk perdagangan bebas antar anggota (misalnya AFTA, APEC, EFTA, LATA, CARICOM, ANZERTA, CACM dan NAFTA). Pendekatan yang kedua ini menimbulkan pertanyaan, apakah perdagangan akan menuju ke arah *free trade* atau malah menimbulkan proteksi yang berlebihan.

Dalam memasuki awal tahun 2002, negara-negara ASEAN telah memasuki babak baru, yaitu diberlakukan pasar bebas ASEAN (AFTA). AFTA 2002 pada hakikat-

nya berbicara tentang era pasar bebas di lingkungan ASEAN, yang dilontarkan sejak tahun 1992. Kondisi dunia usaha Indonesia saat itu memungkinkan dan dirasakan masuk akal untuk memasuki pasar bebas ASEAN. Namun, kondisi Indonesia tahun 1997-2001, pertumbuhan ekonomi terhenti dibarengi dengan jatuh tempo pembayaran utang luar negeri, dan ini mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi sampai sekarang, sehingga ide AFTA 2002 menjadi hal yang menakutkan bagi dunia usaha Indonesia.

Makalah ini akan menyoroiti permasalahan perdagangan luar negeri Indonesia dengan dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, dibahas tentang kinerja ekspor-impor Indonesia dan *kedua*, tentang bagaimana kesiapan Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN (AFTA).

LATAR BELAKANG BERDIRINYA AFTA

Dalam pengelompokan perdagangan internasional menyebabkan diskriminasi dalam perdagangan itu sendiri dengan kelompok luar. Di lain pihak, pengelompokan perdagangan dengan anggotanya menyebabkan perdagangan bebas. Dalam literatur ekonomi internasional dibedakan beberapa jenis utama blok-blok ekonomi, yaitu :

1. *Preferential Trading Club*, yaitu apabila dua negara atau lebih mengurangi bea impor masing-masing negara terhadap barang impor di antara anggotanya.
2. *Free Trade Area*, yaitu apabila dua negara atau lebih menghapus seluruh bea impor antara anggotanya dan mengenakan tarif hanya terhadap negara lain (non-anggota).
3. *Customs Union*, yaitu apabila dua negara atau lebih membentuk *free trade area* ditambah dengan membuat daftar tarif eksternal secara umum pada seluruh impor negara non-anggota.
4. *Common Market*, yaitu apabila dua negara atau lebih membentuk *customs union* dan ditambah dengan mengikuti kebebasan perpindahan faktor produksi di antara anggotanya.
5. *Economic Union*, yaitu apabila dua negara atau lebih membentuk *common market* ditambah proses penyeragaman kebijakan fiskal, dan moneter pada ekonomi mereka.

Dari blok-blok perdagangan internasional dapat dilihat bahwa ASEAN telah memulai babak baru menuju tahap dua, yaitu tahap *free trade area*. AFTA didirikan dengan latar belakang beberapa hal, yaitu: (a) adanya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan

dunia baru (semakin ketatnya persaingan pasar internasional), (b) perubahan internal, yakni adanya kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir, dan (c) menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi daya saing.

Dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 Desember 1995 di Bangkok, para pimpinan ASEAN menegaskan kembali komitmennya, bahwa AFTA akan dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2003. Pada tahun 2003 nanti seluruh negara ASEAN melakukan perdagangan bebas, arus perdagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang lainnya bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN, hanya dengan hambatan 0-5% dan tidak ada lagi hambatan non tarif. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan AFTA tersebut, maka disepakati 15 produk industri yang dipercepat penurunan tarifnya menjadi 0-5%, yaitu semen, pupuk, pulp, tekstil, perhiasan dan permata, perabot dari kayu dan rotan, barang kulit, plastik, obat-obatan, elektronika, kimia, produk karet, minyak nabati, gelas keramik dan katoda tembaga.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

Kiherja neraca perdagangan Indonesia, khususnya komoditi non

migas sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Situasi perekonomian dunia tahun 2000 hingga kini masih diliputi berbagai kendala dan belum sepenuhnya pulih akibat resesi berkepanjangan. Walaupun keadaan perekonomian di

negara-negara maju sudah memperlihatkan perbaikan pada tahun 2000, namun menjelang tahun 2002 negara-negara industri mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2000.

Tabel 1.
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi (Versi IMF)
Tahun 2000 dan 2001

Negara	2000 (%)	2001(%)
Dunia	4.7	2.6
Amerika Serikat	4.1	1.3
Uni eropa	3.4	1.8
Jepang	1.5	-0.5
Asia	6.8	5.8
Afrika	2.8	3.8
Rusia	8.3	4.0

Sumber : *BBC online*

Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi keadaan tersebut dengan melakukan serangkaian usaha-usaha peningkatan perdagangan luar negeri dan surplus neraca perdagangan nasional. Upaya yang telah dilakukan di antaranya melalui usaha peningkatan ekspor non migas ke berbagai negara-negara Asia lainnya, maupun melalui jalur perjanjian baik bilateral maupun multilateral, seperti AFTA, GATT dan APEC.

Di samping itu juga dengan berbagai insentif dan kebijakan

untuk lebih mengarahkan impor kepada impor barang modal untuk menunjang perkembangan produksi dalam negeri, serta mendorong peningkatan penanaman modal baik pemerintah, swasta maupun asing di Indonesia. Hal ini didukung pula dengan serangkaian kebijakan yang mengarah pada pengurangan biaya tinggi sebagai usaha peningkatan ekspor non migas dan mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia terutama pada neraca transaksi berjalan.

Tabel 2.
Neraca Perdagangan Indonesia (US\$ Juta)
Tahun 1995/1996-1999/2000

Tahun	Ekspor Migas	Impor Migas	Ekspor Nonmigas	Impor Non migas	Neraca Perdagangan Total	Neraca Perdagangan Non migas
95/96	10.616	3.905	37.138	37.597	4.476	-459
96/97	12.771	4.693	39.267	41.126	4.599	-1.859
97/98	10.238	4.085	45.924	38.619	-9.328	7.305
96/99	7.286	2.837	41.068	27.870	7.526	13.198
99/00	12.161	4.524	43.384	28.154	344	15.230

Sumber : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

Perkembangan ekspor non migas, sejak diluncurkan Paket Kebijakan 23 Mei 1995 dan dilanjutkan dengan Paket Deregulasi Januari 1996 yang dalam bidang perdagangan isinya pada hakikatnya sama, yaitu penghapusan hambatan tarif bea masuk impor. Penghapusan dari sebagian hambatan bukan tarif (*non-tariff barrier*) juga dilakukan pemerintah telah memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan neraca perdagangan Indonesia. Namun, memasuki awal terjadinya krisis ekonomi terjadi defisit neraca perdagangan. Sedangkan pasca krisis ekonomi memperlihatkan pengurangan defisit dalam neraca perdagangan. Hal ini kemungkinan karena pengaruh melemahnya mata uang rupiah, sehingga menyebabkan menurunnya harga barang ekspor Indonesia, dan ini mendorong peningkatan barang ekspor.

PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA

Dari sisi ekspor non-migas tahun 2000 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, naik sebesar 27,6 persen dibandingkan dengan tahun 1999. Ekspor barang Indonesia sejak tahun 1995 mencerminkan terjadinya perubahan struktur produk. Tabel 3 memperlihatkan betapa komoditas seperti pertanian terus menerus mengalami penurunan, sedangkan hasil industri mengalami kenaikan yang sangat berarti.

Dalam komoditas hasil industri, yang mengalami kenaikan adalah; pakaian jadi, tekstil, karet olahan, alat-alat listrik dan kertas. Jika dilihat secara parsial, ekspor bahan bakar masih menduduki ranking tertinggi, ini menunjukkan bahwa ekspor migas masih mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun jika dilihat secara keseluruhan, peranan migas semakin lama semakin mengecil.

Tabel 3
 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (US\$ Juta)
 Tahun 1995 - 2000

SITC 1 Digit	1995	1996	1997	1998	1999	2000
0 Bahan makanan	3558.0	3767.0	3546.0	3717.0	3646.0	3502.0
1 Minuman	196.0	229.0	253.0	258.0	226.0	234.0
2 bahan mentah	5035.0	5082.0	4357.0	3720.0	3397.0	4318.0
3 Bahan bakar	11508.0	12860.0	13353.0	9429.0	11189.0	15682.0
4 minyak/lemak	1384.0	1577.0	2280.0	1520.0	1825.0	1772.0
5 bahan kimia	1524.0	1726.0	1883.0	2092.0	2382.0	3163.0
6 hasil industri mnr bahan	10438.0	10796.0	9703.0	6772.0	11031.0	12340.0
7 mesin & alat angkut	3828.0	4999.0	4622.0	4656.0	5293.0	10770.0
8 hasil industri lainnya	7876.0	8688.0	6982.0	6659.0	8223.0	9949.0
9 lainnya	46.0	90.0	5569.0	8024.0	1452.0	392.0
Hasil Pertanian	2888.5	2912.7	3132.6	3653.5	2901.5	2709.1
Hasil Industri	29328.2	32124.8	34985.2	34593.4	33332.4	42003.0
Hasil Tambang (tanpa migas)	2690.9	3019.8	3107.1	2704.4	2625.9	3040.8
Total Ekspor	45418.0	49.814.0	50.444.0	48.847.0	48665.0	62.124.0

Sumber : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

Dari tabel 4 dapat dilihat Pada tahun 1995 dan 1997 ekspor komoditas Indonesia menduduki urutan pertama ditujukan untuk ekspor ke Jepang (33% dan 23% dari total ekspor), baru disusul oleh negara-negara ASEAN (17%), Amerika Serikat (14% dan 13%) dan Uni Ero-

pa (14% dan 15%), serta Australia (2% dan 3%). Sedangkan memasuki tahun 2000 peranan Indonesia dalam ASEAN semakin memberikan gambaran yang meningkat, yaitu 17.5% dari total ekspor. Sedangkan tujuan ekspor Indonesia masih tetap didominasi ke Jepang.

Tabel 4.
 Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (US\$ Juta)
 Tahun 1995, 1997 dan 2000

Negara	1995		1997		2000	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
ASEAN	6475.8	17	9258.0	17	10883.4	17.5
Jepang	12288.3	33	12461.3	23	14415.3	23.0
Amerika Serikat	5229.7	14	7113.1	13	8475.5	14.0
Australia	915.2	2	1510.7	3	1519.5	2.4
Uni Eropa	5391.3	14	8055.5	15	8664.6	14.0
Total	36823.0	100	53443.3	100	62124.0	100.0

Sumber : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

PERKEMBANGAN IMPOR INDONESIA

Proporsi dari impor bahan baku masih dominan hingga akhir 1997, meskipun kemudian cenderung menurun. Impor bahan baku mencapai hampir 73 persen pada tahun 1995, sementara impor barang modal sekitar 21 persen. Baru pada akhir tahun 2000, impor barang modal menurun menjadi 14 persen, hal ini disebabkan karena terjadinya

krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak dari tahun 1997 hingga sekarang belum ada tanda-tanda terjadinya pemulihan ekonomi. Padahal peningkatan barang modal diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sedangkan impor bahan baku mengalami peningkatan menjadi 78 persen. Impor Indonesia secara keseluruhan dari tahun 1995 hingga tahun 2000 mengalami penurunan rata-rata 3.5 persen.

Tabel 5

Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (US\$ Juta)
Tahun 1995 - 2000

SITC 1 Digit	1995	1996	1997	1998	1999	2000
0 Bahan makanan	3023	3931	2983	2612	3238	2782
1 Minuman	178	220	250	93	153	180
2 bahan mentah	3643	3478	2979	2365	2500	3304
3 Bahan bakar	3007	3670	4047	2686	3726	6071
4 minyak/lemak	105	102	116	47	32	48
5 bahan kimia	6251	6031	5913	4125	4497	5893
6 hasil industri mnr bahan	6669	6630	6491	4541	3451	5041
7 mesin & alat angkut	16290	17497	17573	9932	5710	9212
8 hasil industri lainnya	1426	1367	1324	935	694	977
9 lainnya	37	3	4	1	2	7
Barang Konsumsi	2350.4	2805.9	2166.3	1917.7	2468.3	2718.7
Bahan baku	29586.6	30469.7	30229.5	19611.8	18475.0	26018.7
Barang Modal	8691.7	9652.9	9284.0	5807.4	3060.0	4777.4
Total Impor	40628.7	42928.5	41679.8	27336.9	24003.0	33514.8

Sumber: : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

Jika dilihat pada Tabel 6, tampak bahwa impor Indonesia terbesar berasal dari Jepang pada tahun 1995 (22% dari total impor), kemudian digantikan perannya oleh Uni Eropa pada tahun 1997 (20% dari total impor), dan pada tahun 2000 dido-

minasi oleh ASEAN mempunyai peranan terhadap impor Indonesia sebesar 19% dari total impor. Dari gambaran ini, maka dengan masuknya Indonesia ke pasar bebas ASEAN sangat menguntungkan, terutama bagi industri dalam negeri Indonesia.

Tabel 6.
 Impor Indonesia Menurut Negara Tujuan (US\$ Juta)
 Tahun 1995, 1997 dan 2000

Negara	1995		1997		2000	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
ASEAN	4219.0	10	5413.1	12	6484.9	19
Jepang	9216.8	22	8252.3	19	5397.3	16
Amerika Serikat	4755.9	12	5440.9	13	3390.3	10
Australia	2015.5	5	2426.7	6	1693.8	5
Uni Eropa	8175.3	20	8332.5	20	4163.3	12
Total	40.628.7	100	41679.8	100	33514.8	100

Sumber : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

PERBANDINGAN EKSPOR IMPOR INDONESIA

Dalam perdagangan internasional, peranan ekspor sangat menentukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan ini sangat berkaitan

dengan nilai tukar (kurs). Semakin besar peranan ekspor terhadap impor, maka akan mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Dari Tabel 7 dapat dilihat data ekspor dan impor Indonesia menurut negara tujuan.

Tabel 7.
 Perbandingan Ekspor dan Impor Indonesia
 menurut Negara Tujuan (US\$ juta)
 Tahun 1995, 1997 dan 2000

Negara	Tahun 1995			Tahun 1997			Tahun 2000		
	Ekspor	Impor	Selisih	Ekspor	Impor	Selisih	Ekspor	Impor	Selisih
ASEAN	6475.8	4219.0	2256.8	5413.1	3413.0	2000.1	10003.4	6403.0	3590.4
Malaysia	986.6	767.0	219.6	1506.1	8648	641.3	1971.8	1128	843
Thailand	702.9	737.1	-34.2	847.1	866.7	-19.6	1026.4	1109	-82.7
Philipina	590.2	81.2	509.0	793.0	127	666	817.6	114.7	704.9
Singapura	3766.7	2367.5	1399	5461.9	3411	2051	6562.4	3788	2773.8
Brunei	24.0	0.5	23.5	39.5	6.6	32.9	25.3	16.5	8.8
Vietnam	263.6	156.3	107.3	389.8	117.3	272.5	360.5	303.3	57.2
Kamboja	80.0	4.4	75.6	70.0	0.1	69.9	51.7	0.7	51.0
Laos	1.4	0.0	1.4	0.9	0.7	0.2	0.9	1.2	-0.3
Myanmar	60.4	105.0	-44.6	149.7	19.0	130.7	64.8	22.0	42.8

Sumber : BPS, *Indikator Ekonomi*, Juli 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa impor Indonesia banyak didominasi dari Singapura, dan tujuan ekspor Indonesia juga didominasi ke Singapura. Pada tahun 1995, ekspor Indonesia di kawasan ASEAN melebihi impornya, kecuali untuk Thailand dan Myanmar. Impor mereka lebih dominan daripada ekspor Indonesia. Sedangkan pada tahun 1997, Impor Thailand lebih dominan daripada ekspor Indonesia, dan pada tahun 2000, impor Thailand dan Laos lebih besar dari ekspor Indonesia.

KINERJA INDUSTRI INDONESIA

Sebagai negara penganut sistem ekonomi pasar, perkembangan yang

terjadi di dunia internasional sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kinerja suatu industri dapat dilihat dari daya kompetisi produk. Sedangkan untuk kinerja industri nasional dapat diukur dari kompetisi produk unggulan suatu negara (Indonesia) dibandingkan dengan dunia.

Terlihat pada Tabel 8 bahwa harga komoditas unggulan Indonesia (terkumpul 33 produk) lebih tinggi rata-rata sekitar 22 persen dibandingkan dengan harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi (margin keuntungan) produsen penghasil produk tersebut masih belum mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran luar negeri.

Tabel 8.
Perbandingan Harga Komoditi
Industri Indonesia terhadap Dunia Tahun 1995

Komoditi	Harga domestik terhadap dunia (%)
Tekstil	39
Produk kayu	-22
Kertas	23
Pupuk	9
Baja	13
Rata-rata	22

Sumber : Kuncoro dan Abimanyu (1995)

Sedangkan menurut *The World Competitiveness Report 2001* terbitan *World Economic Forum* (WEF, 2001), dari 49 negara yang disurvei, Indo-

nesia berada di peringkat paling rendah, dan ini berarti daya saing Indonesia semakin memburuk jika dibandingkan dengan tahun 2000

yang berada diperingkat 44 dan 37 pada tahun 1999. Sebagai perbandingan, AS berada pada peringkat paling tinggi, sedangkan negara Asia yang disurvei, Singapura dan Hong Kong masuk kelompok dengan tingkat daya saing yang cukup signifikan, dari posisi 12 pada tahun 2000 menjadi 6 pada tahun 2001.

Sedangkan yang cukup memprihatinkan dari hasil survei ini adalah walaupun posisi Cina lebih buruk dibandingkan dengan Singapura, Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan, namun jauh lebih baik dibandingkan dengan posisi Indonesia. Kenyataan ini ditambah lagi dengan posisi Cina di pasar ekspor yang jauh lebih unggul daripada Indonesia, memberi kesan bahwa daya saing Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Cina, dan ini berarti Cina merupakan ancaman serius bagi pengusaha-pengusaha Indonesia di pasar ASEAN.

Dalam analisisnya, WEF menggunakan 286 buah komponen statistik dari negara bersangkutan. Semua statistik ini dikelompokkan dan empat faktor masukan, yakni: kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Kombinasi kondisi dari masing-masing faktor tersebut menentukan tingkat daya saing suatu negara.

PENUTUP

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang menghantui Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi-pasinya. Langkah-langkah itu adalah: (1) membangun spirit bahwa AFTA 2002 tidak perlu ditakuti, walaupun tantangan banyak dan beragam, (2) membangun sikap optimisme untuk mencegah hilangnya kepercayaan diri, (3) memaksimalkan membangun sistem pasar, (4) mendahulukan kepentingan rakyat, dan (5) kebijakan yang mengarah kepada pengurangan produk biaya tinggi, terutama akibat KKN, dan melakukan rekonsiliasi pemulihan ekonomi.

Diharapkan apabila Indonesia benar-benar dapat menempuh langkah-langkah di atas dengan arif, maka dunia usaha akan dapat menghadapi persaingan era pasar bebas AFTA 2002. Pemerintah juga harus tidak memproteksi, tetapi memberdayakan dunia usaha nasional dengan dua cara utama.

Pertama, pemerintah menyiapkan sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan, semua fasilitas dasar (*public goods*), sesuai fungsi utama dari keberadaan pemerintah di suatu negara, seperti pendidikan, keamanan, perkembangan teknologi,

DAFTAR ISI
JURNAL EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
PL. INKINDA. NO. 01. 2002

infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan udara dan laut, telekomunikasi, penerangan, gudang dan pelayanan umum, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kedua, pemerintah merumuskan suatu kebijaksanaan nasional yang mendukung ke arah perdagangan bebas (terdiri dari kebijakan industri, kebijakan sektor investasi, kebijakan perdagangan luar negeri dan fiskal, dan kebijakan lainnya).

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap pengusaha

nasional adalah mempersiapkan diri dalam segala aspek, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengembangan pusat-pusat informasi, diversifikasi produk, bahan baku dan merumuskan strategi bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan kondisi perdagangan dunia yang terus berubah. Jika dunia usaha dan pemerintah terjadi koordinasi yang selaras dan serasi, maka AFTA akan dapat menjadi peluang emas bagi produk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. (1996). *Prospek Perekonomian Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas Dunia*, Diskusi Bisnis LPMA FE UMY, Yogyakarta.
- Anonim. (2002). "Strategi Dunia Usaha Menghadapi AFTA 2002", *Manajemen*, Januari.
- Buletin Statistik Bulanan. (2001). *Indikator Ekonomi*, BPS, Jakarta.
- Hasibuan, Nurimansyah. (1994). *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, dkk. (1997). *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Widya Sarana Informatika Yogyakarta.
- Lindert, Peter H. (1991). *International Economics*, Richard D. Irwin.